

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Periode 2019 - 2021

Nanda Ayu Septian¹, Dewianti Dwi Wahyuni², Sayekti Suindyah Dwiningwarni³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: ¹ nandaayuseptian77@gmail.com, ² dewiantidw31@gmail.com, ³ sayektisuindyah@uwp.ac.id

Abstract

Analysis of the financial performance of the regional government of Pamekasan Regency in the period 2019 - 2021. Analysis of local government performance can be seen from the financial performance of an area. So to analyze the financial performance of a region by analyzing the financial ratios of the Regional Expenditure Budget (APBD) that have been set and have been implemented.

This study aims to analyze the financial performance of the regional government of Pamekasan Regency in the period 2019 - 2021. The type of data used in this research is secondary data, so the type of research used in this research is descriptive quantitative using ratio analysis method. The results of the study show that the use of the regional government revenue budget for the Pamekasan district, seen from the analysis of the variance of the revenue budget for the 2019 - 2021 fiscal year based on the budget realization report, produces a positive balance value, meaning that the financial performance of local government revenues can be said to be good. So that the financial performance indicates that it has been able to obtain revenue in excess of the budgeted amount. The degree of decentralization that has occurred in Pamekasan district is relatively low so that financial dependence on the central government is relatively high. Meanwhile, in terms of the effectiveness ratio of PAD receipts in Pamekasan district, it can be concluded that during the 2019 - 2021 period it has been categorized as very effective because the PAD revenue target has exceeded the previous target.

Keywords : *Regional Government Financial Performance, Regional Revenue and Expenditure Budget.*

Abstrak

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan periode tahun 2019 – 2021. Analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan suatu daerah. Maka untuk menganalisis kinerja keuangan suatu daerah dengan menganalisis rasio keuangan Anggaran Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan periode tahun 2019 - 2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode analisis rasio. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dilihat dari analisis varians anggaran pendapatan tahun anggaran 2019 – 2021 berdasarkan laporan realisasi anggaran menghasilkan nilai keseimbangan yang positif, artinya kinerja keuangan penerimaan pemerintah daerah dapat dikatakan baik. Sehingga kinerja keuangan menunjukkan telah mampu memperoleh pendapatan melebihi dari jumlah yang dianggarkan. Derajat desentralisasi yang terjadi di Kabupaten Pamekasan relatif rendah sehingga ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat relatif tinggi. Sedangkan dari segi rasio efektivitas penerimaan PAD di Kabupaten Pamekasan dapat disimpulkan bahwa selama periode 2019 –

2021 sudah dikategorikan sangat efektif karena target penerimaan PAD sudah melebihi target sebelumnya.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

INTRODUCTION

Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk dari strategi pembangunan daerah. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, di setiap daerah atau wilayah dapat lebih leluasa untuk melakukan perencanaan pembangunan pada daerahnya yang sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan. Menurut pendapat (Rusliana et al., 2020) yang menyatakan bahwa otonomi daerah telah dilaksanakan sejak Januari 2001 dan telah memberikan peran yang lebih besar terhadap pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah. Sementara pelaksanaan otonomi daerah merupakan momen yang tepat untuk memberi peran yang lebih besar terhadap pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di sebuah daerah.

Sehingga selain memberikan peran yang lebih besar untuk menangani pembangunan di suatu daerah, maka otonomi daerah juga memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah (APBD) menjadi lebih mandiri. Yang dimana program pembangunan sebagai unsur pos belanja dalam APBD membutuhkan pos pendapatan dan pembiayaan dalam bentuk APBD. Menurut pendapat (Harahap, 2020) yang menyatakan bahwa dana perimbangan sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah yang tidak diperoleh pemerintah daerah secara maksimal, karena ada sebagian yang menjadi hak pemerintah pusat. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat peraturan dan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. Menurut pendapat (Rahmayati, 2016) yang menyatakan bahwa penilaian kinerja keuangan yang dilakukan terhadap APBD oleh pemerintah daerah yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Sementara menurut pendapat (Harahap, 2020) yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yang meliputi : untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja merupakan sebuah pencapaian dari apa yang telah di rencanakan oleh sebuah organisasi. Sehingga jika suatu pencapaian melebihi dari apa yang telah di rencanakan, maka kinerja organisasi dapat

dikatakan baik. Namun apabila perencanaan tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka kinerja dari organisasi tersebut dapat dikatakan buruk. Sehingga kinerja keuangan merupakan suatu alat ukur yang menggunakan indikator keuangan.

Menurut pendapat (Mataris dan Digdowiseiso, 2022) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki arti bahwa kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya, yang ditetapkan melalui suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil kerja bidang keuangan daerah dengan berbagai indikator keuangan. Kinerja keuangan merupakan hasil realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan basis akrual. Sementara menurut pendapat (Rusliana et al., 2020) yang menyatakan bahwa analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang dimana hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial atau politik. Sehingga analisis terhadap laporan keuangan dianggap menjadi alat manajerial yang penting untuk evaluasi kekuatan dan kelemahan suatu daerah, dengan demikian kondisi keuangan merupakan konsep yang luas untuk menggambarkan kesehatan keuangan pemerintah daerah.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Harahap, 2020) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dikatakan cukup baik walaupun rasio derajatnya tergolong rendah. Sehingga secara finansial ketergantungan kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi dan PAD tidak tercapai dengan target yang dianggarkan. Sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rusliana et al., 2020) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Ciamis pada periode 2013 sampai 2018 tergolong rendah, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dalam hal bantuan dalam bentuk Dana Alokasi Umum. Kemampuan tingkat efektivitas keuangan daerah Kabupaten Ciamis berdasarkan rasio efektivitas sudah efektif dalam merealisasikan capaian pendapatan daerah terhadap anggaran pendapatan yang telah di susun atau di rencanakan.

Sehingga penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu yang mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan beberapa rasio. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek yang digunakan sebagai penelitian yaitu pada Kabupaten Pamekasan karena Pamekasan merupakan salah satu pemerintah daerah yang sudah berdiri lama dan memiliki letak geografis yang sangat strategis. Sehingga pada kondisi tersebut hendaknya menjadikan Kabupaten Pamekasan memiliki potensi keuangan daerah yang cukup tinggi dan diharapkan mampu memiliki kinerja keuangan yang baik dalam menunjang pembangunan daerah.

METHODS

Berdasarkan judul dan permasalahan yang telah di kemukakan, maka jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Yang dimana pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai suatu fenomena yang nampak dari data-data yang bersifat kuantitatif dan telah dianalisis. Sehingga data dalam penelitian ini merupakan data sekunder dimana data tersebut diperoleh melalui laporan keuangan daerah Kabupaten Pamekasan pada periode 2019 – 2021. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu : mengumpulkan data-data keuangan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, melakukan perhitungan analisis rasio keuangan.

RESULT AND DISCUSSION

Analisis Varians Anggaran Pendapatan

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Pamekasan
Periode 2019

URAIAN	REF	2019		%	2018
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)		REALISASI(Rp)
PENDAPATAN - LRA	7.5.1.A				
PENDAPATAN ASLIDAERAH - LRA	7.5.1.A.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.5.1.A.1.1	33.584.208.080,00	44.204.121.424,40	131,62	36.520.160.896,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.5.1.A.1.2	16.471.312.353,00	17.762.125.858,00	107,84	16.150.680.713,88
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.5.1.A.1.3	1.847.294.966,00	2.016.350.446,08	109,15	1.923.442.124,80
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	7.5.1.A.1.4	126.038.257.162,00	155.688.839.988,65	123,53	167.816.380.314,41
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA		177.941.072.561,00	219.671.437.717,13	123,45	222.410.664.049,09
PENDAPATAN TRANSFER -LRA	7.5.1.A.2				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LRA	7.5.1.A.2.1				

Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	7.5.1.A.2.1.1	23.732.775.000,00	15.540.952.158,00	65,48	23.083.303.943,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak -LRA	7.5.1.A.2.1.2	130.647.025.000,00	102.587.540.473,00	78,52	112.658.021.348,00
Dana Alokasi Umum - LRA	7.5.1.A.2.1.3	891.828.222.000,00	892.340.709.000,00	100,06	849.764.469.000,00
Dana Alokasi Khusus - LRA	7.5.1.A.2.1.4	309.162.085.000,00	286.620.072.006,00	92,71	266.900.962.262,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN - LRA		1.355.370.107.000,00	1.297.089.273.637,00	95,70	1.252.406.756.553,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA - LRA	7.5.1.A.2.2				
Dana Penyesuaian - LRA	7.5.1.A.2.2.1	213.056.452.000,00	213.056.448.000,00	100,00	187.764.284.400,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA - LRA		213.056.452.000,00	213.056.448.000,00	100,00	187.764.284.400,00

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LRA	7.5.1.A.2.3				
Bagi Hasil Pajak Provinsi - LRA	7.5.1.A.2.3.1	90.323.191.591,00	119.611.793.989,00	132,43	102.727.693.913,00
Bagi Hasil Lainnya - LRA	7.5.1.A.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LRA		90.323.191.591,00	119.611.793.989,00	132,43	102.727.693.913,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LRA		1.658.749.750.591,00	1.629.757.515.626,00	98,25	1.542.898.734.866,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA	7.5.1.A.3				
Pendapatan Hibah	7.5.1.A.3.1	63.419.940.000,00	58.113.040.000,00	91,63	54.083.440.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA	7.5.1.A.3.2	12.472.139.000,00	12.472.139.000,00	100,00	21.708.200.000,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA		75.892.079.000,00	70.585.179.000,00	93,01	75.791.640.000,00
JUMLAH PENDAPATAN -		1.912.582.902.152,00	1.920.014.132.343,13	100,39	1.841.101.038.915,09

LRA					
BELANJA	7.5.1.B				
BELANJA OPERASI	7.5.1.B.1				
Belanja Pegawai	7.5.1.B.1.1	819.005.172.249,00	696.775.967.923,00	85,08	696.617.746.036,90
Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.B.1.2	593.278.662.024,00	476.988.790.160,85	80,40	359.004.837.716,23
Belanja Bunga	7.5.1.B.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	7.5.1.B.1.4	53.985.400.000,00	47.268.400.000,00	87,56	74.801.168.041,36
Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.B.1.5	18.981.241.021,00	8.805.330.000,00	46,39	5.893.820.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.B.1.6	1.083.428.374,00	1.083.428.133,00	100,00	1.060.725.700,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		1.486.333.903.668,00	1.230.921.916.216,85	82,82	1.137.378.297.494,49
BELANJA MODAL	7.5.1.B.2				
Belanja Tanah - LRA	7.5.1.B.2.1	18.229.350.000,00	9.164.167.600,00	50,27	7.328.519.100,00
Belanja Peralatan dan Mesin - LRA	7.5.1.B.2.2	127.893.025.835,00	89.904.495.983,00	70,30	69.406.570.346,00
Belanja Gedung dan Bangunan - LRA	7.5.1.B.2.3	107.896.003.154,00	86.557.442.183,00	80,22	66.002.243.608,26
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA	7.5.1.B.2.4	288.885.331.989,00	202.798.056.288,00	70,20	163.341.926.819,57
Belanja Aset Tetap Lainnya - LRA	7.5.1.B.2.5	13.077.392.450,00	11.182.207.822,00	85,51	11.261.436.632,00
JUMLAH BELANJA MODAL		555.981.103.428,00	399.606.369.876,00	71,87	317.340.696.505,83
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.B.3				
Belanja Tidak Terduga	7.5.1.B.3.1	5.100.000.000,00	4.129.064.250,00	80,96	3.367.467.650,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		5.100.000.000,00	4.129.064.250,00	80,96	3.367.467.650,00
TRANSFER	7.5.1.B.4				
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	7.5.1.B.4.1				
Bagi Hasil Pajak	7.5.1.B.4.1.1	3.854.389.500,00	3.249.699.162,50	84,31	4.024.590.990,00
Bagi Hasil Retribusi	7.5.1.B.4.1.2	2.492.209.930,00	2.200.112.562,50	88,28	2.489.624.959,00

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	7.5.1.B.4.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Alokasi Dana Desa	7.5.1.B.4.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		6.346.599.430,00	5.449.811.725,00	85,87	6.514.215.949,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	7.5.1.B.4.2				
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.1.B.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa (Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan bantuan keuangan lainnya dari Kab/Kota ke desa)	7.5.1.B.4.2.2	347.623.603.500,00	309.042.645.990,00	88,90	254.719.033.700,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.1.B.4.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		347.623.603.500,00	309.042.645.990,00	88,90	254.719.033.700,00
JUMLAH TRANSFER		353.970.202.930,00	314.492.457.715,00	88,85	261.233.249.649,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2.401.385.210.026,00	1.949.149.808.057,85	81,17	1.719.319.711.299,32
SURPLUS/(DEFISIT)	7.5.1.C	(488.802.307.874,00)	(29.135.675.714,72)	0,00	121.781.327.615,77
PEMBIAYAAN	7.5.1.D				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.D.1				
Penggunaan SILPA	7.5.1.D.1.1	511.391.307.874,00	511.391.307.874,22	100,00	369.639.626.061,95
Pencairan Dana Cadangan	7.5.1.D.1.2	0,00	0,00	0,00	23.664.938.406,72
Penerimaan Kembali Investasi	7.5.1.D.1.3	0,00	241.000.000,00	0,00	24.625.500,00
Penerimaan Dana Titipan	7.5.1.D.1.4	0,00	0,00	0,00	1.274.272.195,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.5.1.D.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		511.391.307.874,00	511.632.307.874,22	100,05	394.603.462.163,67
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.D.2				
Pembentukan Dana Cadangan	7.5.1.D.2.1	20.000.000.000,00	0,00	0,00	219.209.710,22
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	7.5.1.D.2.2	2.589.000.000,00	2.589.000.000,00	100,00	3.500.000.000,00
Pembayaran Pokok utang	7.5.1.D.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Dana Titipan	7.5.1.D.2.4	0,00	0,00	0,00	1.274.272.195,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		22.589.000.000,00	2.589.000.000,00	11,46	4.993.481.905,22
PEMBIAYAAN NETTO	7.5.1.E	488.802.307.874,00	509.043.307.874,22	104,14	389.609.980.258,45
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.1.F	0,00	479.907.632.159,50	0,00	511.391.307.874,22

Sumber Data : BAPPEDA Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada periode 2019 secara umum realisasi memiliki nilai saldo yang positif. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pendapatan pemerintah sangat baik karena mampu untuk memperoleh pendapatan yang melebihi dengan jumlah yang dianggarkan.

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Pamekasan
Periode 2020

URAIAN	REF	2020		%	2019
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
PENDAPATAN - LRA	7.5.1.A				
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	7.5.1.A.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.5.1.A.1.1	34.430.296.524,00	37.192.592.664,00	108,02	44.204.121.424,40
Pendapatan Retribusi Daerah -LRA	7.5.1.A.1.2	15.513.305.478,00	16.517.650.380,73	106,47	17.762.125.858,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.5.1.A.1.3	1.847.294.966,00	2.052.672.129,60	111,12	2.016.350.446,08
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	7.5.1.A.1.4	130.944.456.694,00	176.499.561.830,38	134,79	155.688.839.988,65
JUMLAH PENDAPATANASLI DAERAH - LRA		182.735.353.662,00	232.262.477.004,71	127,10	219.671.437.717,13
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	7.5.1.A.2				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LRA	7.5.1.A.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	7.5.1.A.2.1.1	34.238.381.048,00	24.893.918.520,00	72,71	15.540.952.158,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - LRA	7.5.1.A.2.1.2	113.169.432.422,00	95.635.953.801,00	84,51	102.587.540.473,00
Dana Alokasi Umum - LRA	7.5.1.A.2.1.3	809.642.625.000,00	800.743.381.000,00	98,90	892.340.709.000,00
Dana Alokasi Khusus - LRA	7.5.1.A.2.1.4	259.560.355.000,00	257.376.270.637,00	99,16	286.620.072.006,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LRA		1.216.610.793.470,00	1.178.649.523.958,00	96,88	1.297.089.273.637,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA - LRA	7.5.1.A.2.2				
Dana Penyesuaian - LRA	7.5.1.A.2.2.1	241.723.722.200,00	243.080.838.800,00	100,56	213.056.448.000,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA - LRA		241.723.722.200,00	243.080.838.800,00	100,56	213.056.448.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LRA	7.5.1.A.2.3				
Bagi Hasil Pajak Provinsi - LRA	7.5.1.A.2.3.1	131.434.939.005,00	100.885.563.104,00	76,76	119.611.793.989,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LRA		131.434.939.005,00	100.885.563.104,00	76,76	119.611.793.989,00
URAIAN	REF	2020		%	2019
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LRA		1.589.769.454.675,00	1.522.615.925.862,00	95,78	1.629.757.515.626,00

LAIN-LAIN PENDAPATANYANG SAH - LRA	7.5.1.A.3				
Pendapatan Hibah	7.5.1.A.3. 1	58.308.200.000, 00	56.797.547.100,00	97,41	58.113.040.000, 00
Pendapatan Lainnya - LRA	7.5.1.A.3. 2	12.491.967.000, 00	12.491.967.000,00	100,00	12.472.139.000, 00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA		70.800.167.000, 00	69.289.514.100,00	97,87	70.585.179.000, 00
JUMLAH PENDAPATAN - LRA		1.843.304.975.3 37,00	1.824.167.916.966 ,71	98,96	1.920.014.132.3 43,13
BELANJA	7.5.1.B				
BELANJA OPERASI	7.5.1.B.1				
Belanja Pegawai	7.5.1.B.1. 1	793.415.383.763, 00	674.614.637.282,0 0	85,03	696.775.967.923, 00
Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.B.1. 2	577.651.206.413, 00	501.042.090.318,7 4	86,74	476.988.790.160, 85
Belanja Hibah	7.5.1.B.1. 3	54.226.189.018, 00	49.260.674.919,00	90,84	47.268.400.000, 00
Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.B.1. 4	17.155.411.300, 00	14.972.075.000,00	87,27	8.805.330.000,0 0
Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.B.1. 5	0,00	0,00	0,00	1.083.428.133,0 0
JUMLAH BELANJA OPERASI		1.442.448.190.4 94,00	1.239.889.477.519 ,74	85,96	1.230.921.916.2 16,85
BELANJA MODAL	7.5.1.B.2				
Belanja Tanah - LRA	7.5.1.B.2. 1	6.372.510.000,0 0	5.329.136.400,00	83,63	9.164.167.600,0 0
Belanja Peralatan dan Mesin -LRA	7.5.1.B.2. 2	86.107.140.413, 00	73.704.858.105,00	85,60	89.904.495.983, 00
Belanja Gedung dan Bangunan -LRA	7.5.1.B.2. 3	58.259.599.682, 00	46.125.792.323,60	79,17	86.557.442.183, 00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA	7.5.1.B.2. 4	467.856.730.761, 00	329.621.049.610,7 8	70,45	202.798.056.288, 00
Belanja Aset Tetap Lainnya -LRA	7.5.1.B.2. 5	8.248.555.805,0 0	8.070.272.161,00	97,84	11.182.207.822, 00
JUMLAH BELANJA MODAL		626.844.536.661 ,00	462.851.108.600,3 8	73,84	399.606.369.876 ,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.B.3				
Belanja Tidak Terduga	7.5.1.B.3. 1	70.112.463.370, 00	42.520.226.230,00	60,65	4.129.064.250,0 0
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		70.112.463.370, 00	42.520.226.230,00	60,65	4.129.064.250,0 0
TRANSFER	7.5.1.B.4				
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	7.5.1.B.4. 1				

Bagi Hasil Pajak	7.5.1.B.4.1.1	3.635.470.808,18	3.051.192.248,19	83,93	3.249.699.162,50
Bagi Hasil Retribusi	7.5.1.B.4.1.2	2.663.110.917,82	1.889.194.640,26	70,94	2.200.112.562,50
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		6.298.581.726,00	4.940.386.888,45	78,44	5.449.811.725,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	7.5.1.B.4.2				
URAIAN	REF	2020		%	2019
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa (Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan bantuan keuangan lainnya dari Kab/Kotake desa)	7.5.1.B.4.2.1	310.008.415.700,00	308.917.021.580,00	99,65	309.042.645.990,00
JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		310.008.415.700,00	308.917.021.580,00	99,65	309.042.645.990,00
JUMLAH TRANSFER		316.306.997.426,00	313.857.408.468,45	99,23	314.492.457.715,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2.455.712.187.951,00	2.059.118.220.818,57	83,85	1.949.149.808.057,85
SURPLUS/(DEFISIT)	7.5.1.C	(612.407.212.614,00)	(234.950.303.851,86)	38,37	(29.135.675.714,72)
PEMBIAYAAN	7.5.1.D				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.D.1				
Penggunaan SiLPA	7.5.1.D.1.1	479.907.632.159,00	479.907.813.052,96	100,00	511.391.307.874,22
Penerimaan Pinjaman Daerah	7.5.1.D.1.2	150.000.000.000,00	84.917.143.307,00	56,61	0,00
Penerimaan Kembali Investasi	7.5.1.D.1.3	0,00	0,00	0,00	241.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		629.907.632.159,00	564.824.956.359,96	89,67	511.632.307.874,22
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.D.2				
Pembentukan Dana Cadangan	7.5.1.D.2.1	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	7.5.1.D.2.2	7.500.000.000,00	6.000.000.000,00	80,00	2.589.000.000,00
Pembayaran Pokok utang	7.5.1.D.2.3	419.545,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		17.500.419.545,00	16.000.000.000,00	91,43	2.589.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	7.5.1.E	612.407.212.614,00	548.824.956.359,96	89,62	509.043.307.874,22

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	7.5.1.F	0,00	313.874.652.508,1 0	0,00	479.907.632.159 ,50

Sumber Data : BAPPEDA Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada periode 2020 secara umum realisasi memiliki nilai saldo yang positif. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan pemerintah Kabupaten Pamekasan sangat baik karena mampu untuk memperoleh pendapatan yang melebihi dengan jumlah yang dianggarkan.

Tabel 1.3
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Pamekasan
Periode 2021

URAIAN	REF	2021		%	2020
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
PENDAPATAN - LRA	7.5.1.A				
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	7.5.1.A.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.5.1.A.1.1	42.570.650.387,0 0	38.503.953.058,0 0	90,45	37.192.592.664,0 0
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.5.1.A.1.2	12.086.747.418,0 0	10.053.688.754,0 0	83,18	16.517.650.380,7 3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.5.1.A.1.3	1.854.888.227,00	2.080.932.532,80	112,1 9	2.052.672.129,60
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	7.5.1.A.1.4	150.356.183.905, 00	155.330.465.602, 47	103,3 1	176.499.561.830, 38
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA		206.868.469.937, 00	205.969.039.947, 27	99,57	232.262.477.004, 71
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	7.5.1.A.2				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LRA	7.5.1.A.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	7.5.1.A.2.1 .1	26.906.752.369,0 0	28.566.016.307,0 0	106,1 7	24.893.918.520,0 0
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - LRA	7.5.1.A.2.1 .2	132.061.138.764, 00	136.006.366.140, 00	102,9 9	95.635.953.801,0 0
Dana Alokasi Umum - LRA	7.5.1.A.2.1 .3	817.739.051.000, 00	791.549.034.000, 00	96,80	800.743.381.000, 00
Dana Alokasi Khusus - LRA	7.5.1.A.2.1 .4	301.827.566.000, 00	283.130.820.137, 00	93,81	257.376.270.637, 00

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN - LRA		1.278.534.508.133,00	1.239.252.236.584,00	96,93	1.178.649.523.958,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA - LRA	7.5.1.A.2.2				
Dana Penyesuaian - LRA	7.5.1.A.2.2.1	224.424.623.000,00	224.290.009.800,00	99,94	243.080.838.800,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA - LRA		224.424.623.000,00	224.290.009.800,00	99,94	243.080.838.800,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LRA	7.5.1.A.2.3				
Bagi Hasil Pajak Provinsi - LRA	7.5.1.A.2.3.1	128.208.616.495,00	132.839.643.387,00	103,61	100.885.563.104,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LRA		128.208.616.495,00	132.839.643.387,00	103,61	100.885.563.104,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LRA		1.631.167.747.628,00	1.596.381.889.771,00	97,87	1.522.615.925.862,00
URAIAN	REF	2021		%	2020
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA	7.5.1.A.3				
Pendapatan Hibah	7.5.1.A.3.1	0,00	0,00	0,00	56.797.547.100,00
Pendapatan Lainnya - LRA	7.5.1.A.3.2	98.984.797.008,00	77.007.530.736,15	77,80	12.491.967.000,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA		98.984.797.008,00	77.007.530.736,15	77,80	69.289.514.100,00
JUMLAH PENDAPATAN - LRA		1.937.021.014.573,00	1.879.358.460.454,42	97,02	1.824.167.916.966,71
BELANJA	7.5.1.B				
BELANJA OPERASI	7.5.1.B.1				
Belanja Pegawai	7.5.1.B.1.1	737.236.274.808,00	647.036.267.778,00	87,77	674.614.637.282,00
Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.B.1.2	724.131.220.236,00	611.529.371.926,37	84,45	501.042.090.318,74
Belanja Hibah	7.5.1.B.1.3	71.126.366.923,00	66.791.017.587,02	93,90	49.260.674.919,00
Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.B.1.4	17.563.950.000,00	17.313.945.000,00	98,58	14.972.075.000,00
Belanja Bantuan	7.5.1.B.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00

Keuangan					
JUMLAH BELANJA OPERASI		1.550.057.811,96	1.342.670.602,29	86,62	1.239.889.477,51
		7,00	1,39		9,74
BELANJA MODAL	7.5.1.B.2				
Belanja Tanah - LRA	7.5.1.B.2.1	200.000.000,00	186.724.000,00	93,36	5.329.136.400,00
Belanja Peralatan dan Mesin - LRA	7.5.1.B.2.2	61.845.342.816,00	54.900.122.166,91	88,77	73.704.858.105,00
Belanja Gedung dan Bangunan - LRA	7.5.1.B.2.3	69.699.850.668,00	53.285.144.940,57	76,45	46.125.792.323,60
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA	7.5.1.B.2.4	223.756.597.722,00	203.507.407.015,29	90,95	329.621.049.610,78
Belanja Aset Tetap Lainnya - LRA	7.5.1.B.2.5	17.394.759.391,00	7.318.405.718,97	42,07	8.070.272.161,00
JUMLAH BELANJA MODAL		372.896.550.597,00	319.197.803.841,74	85,60	462.851.108.600,38
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.B.3				
Belanja Tidak Terduga	7.5.1.B.3.1	16.581.972.307,00	16.088.831.966,00	97,03	42.520.226.230,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		16.581.972.307,00	16.088.831.966,00	97,03	42.520.226.230,00
TRANSFER	7.5.1.B.4				
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	7.5.1.B.4.1				
Bagi Hasil Pajak	7.5.1.B.4.1.1	4.161.130.242,00	3.382.183.900,50	81,28	3.051.192.248,19
Bagi Hasil Retribusi	7.5.1.B.4.1.2	886.730.542,00	703.599.998,50	79,35	1.889.194.640,26
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		5.047.860.784,00	4.085.783.899,00	80,94	4.940.386.888,45
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	7.5.1.B.4.2				
Transfer Bantuan Keuangan KeDesa (Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan bantuan keuangan lainnya dari Kab/Kota ke desa)	7.5.1.B.4.2.1	304.542.364.272,00	296.660.822.097,00	97,41	308.917.021.580,00
JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		304.542.364.272,00	296.660.822.097,00	97,41	308.917.021.580,00
JUMLAH TRANSFER		309.590.225.056,00	300.746.605.996,00	97,14	313.857.408.468,45
JUMLAH BELANJA DAN		2.249.126.559,92	1.978.703.844,09	87,98	2.059.118.220,81
		7,00	5,13		8,57

TRANSFER					
SURPLUS/(DEFISIT)	7.5.1.C	(312.105.545.354,00)	(99.345.383.640,71)	31,83	(234.950.303.851,86)
PEMBIAYAAN	7.5.1.D				

URAIAN	REF	2021		%	2020
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.D.1				
Penggunaan SiLPA	7.5.1.D.1.1	313.874.652.507,00	313.874.652.508,10	100,00	479.907.813.052,96
Penerimaan Pinjaman Daerah	7.5.1.D.1.2	0,00	0,00	0,00	84.917.143.307,00
Penerimaan Kembali Investasi	7.5.1.D.1.3	0,00	12.400.000,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		313.874.652.507,00	313.887.052.508,10	100,00	564.824.956.359,96
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.D.2				
Pembentukan Dana Cadangan	7.5.1.D.2.1	0,00	345.862.473,44	0,00	10.000.000.000,00
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	7.5.1.D.2.2	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
Pembayaran Pokok utang	7.5.1.D.2.3	1.769.107.153,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		1.769.107.153,00	345.862.473,44	19,55	16.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	7.5.1.E	312.105.545.354,00	313.541.190.034,66	100,46	548.824.956.359,96
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	7.5.1.F	0,00	214.195.806.393,95	0,00	313.874.652.508,10

Sumber Data : BAPPEDA Kabupaten Pamekasan Tahun 2021

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada periode 2021 secara umum realisasi memiliki nilai saldo yang positif. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan pemerintah Kabupaten Pamekasan sangat baik karena mampu untuk memperoleh pendapatan yang melebihi dengan jumlah yang dianggarkan.

Analisis Derajat Desentralisasi

Tabel 1.4
Derajat Desentralisasi Kabupaten Pamekasan Periode 2019 – 2021

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Rasio %	Naik / turun %
2019	17.762.125.858	219.671.437.717	8,08	-
2020	16.517.650.380	232.262.477.004	7,11	(0,97)
2021	10.053.688.754	205.969.039.947	4,88	(2,23)

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Pamekasan (data diolah)

Berdasarkan hasil olah data pada derajat desentralisasi Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sebesar 8,08% , kemudian pada tahun 2020 derajat desentralisasi Kabupaten Pamekasan sebesar 7,11% , pada tahun 2021 derajat desentralisasi Kabupaten Pamekasan sebesar 4,88%. Sehingga pada tahun 2019 – 2021 mengalami penurunan sebesar 0,97% dan 2,23%.

Analisis Rasio Efektivitas

Tabel 1.5
Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Pamekasan Periode 2019 – 2021

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio %	Naik / turun %
2019	17.762.125.858	177.941.072.561	9,98	-
2020	16.517.650.380	182.735.353.662	9,04	(0,94)
2021	10.053.688.754	206.868.469.937	4,86	(4,18)

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Pamekasan (data diolah)

Berdasarkan hasil olah data pada rasio efektivitas Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dikatakan sudah efektif karena target penerimaan pendapatan asli daerah telah melebihi target dar tahun sebelumnya. Kinerja pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam efektivitas pendapatan asli daerah pada tahun 2019 – 2021 mengalami penurunan sebesar 0,94% dan 4,18% , sehingga dalam hal ini kinerja pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 – 2021 melalui analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah secara keseluruhan dapat dikatakan efektif.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis data dari hasil analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Pamekasan pada periode 2019 - 2021 yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Penggunaan anggaran pendapatan pemerintah daerah kabupaten Pamekasan dilihat dari analisis varians anggaran pendapatan selama tahun anggaran 2019-2021 berdasarkan laporan realisasi anggaran menghasilkan nilai saldo yang positif, yang artinya kinerja keuangan pendapatan pemerintah daerah dapat dikatakan sudah baik.

Sehingga kinerja keuangan mengindikasikan bahwa telah mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Selama periode 2019-2021, derajat desentralisasi yang terjadi di kabupaten Pamekasan relatif rendah sehingga ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat relatif tinggi. Pada rasio efektivitas penerimaan PAD pada kabupaten Pamekasan dapat disimpulkan bahwa selama periode 2019 - 2021 telah dikategorikan sangat efektif karena target penerimaan PAD telah melebihi dari target sebelumnya.

REFERENCES

- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Mataris, H., & Digdowiseiso, K. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. In *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* (Vol. 7, Nomor 1). <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i1.1049>
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. 1(1), 40–54.
- Rusliana, N., Rustandi, A., & Lestari Komarlina, D. H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 139–149. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v1i2.2105>